

**ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN KASUS FREDDY BUDIMAN DI
HARIAN KOMPAS PERIODE BULAN JULI – SEPTEMBER 2016****Dudi Hartono¹, Laksana Purti²**bungdudi@mercubuana.ac.id , windilaksanaputri@yahoo.co.id
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta**Abstract**

Throughout July to August 2016 the mass media enlivened by vent Ferry Budiman, about the deposit he gave to the rogue officials at the National Narcotics Agency (BNN), Customs and Police Headquarters. The busy mass media who proclaimed the case at that time of course can form a certain image of the police in the eyes of the public, both positive and negative image. The media has the ability through the framing tekni done on the news published it. Referring to the views of Peter Berger and Thomas Luckman on the construction of social reality, the polemic between the two opposing camps in the case of Freddy Budiman's vent is nothing but an attempt to build social construction through the process of communication in the mass media. The framing process itself generally involves two stages. First, choose fact or reality. Second, write down facts. This process is related to how the selected facts are then highlighted or eliminated with the use of certain devices, such as placement in a particular page or position, repetition, labeling, graphic usage, photo installation, association, selection of specific sources, etc. (Eriyanto, 2002: 69). Related to the news vent Freddy Budiman writer wanted to see how KOMPAS as mainstream mass media interpret, understand and then frame the image of this event.

Keywords: framing, freddy budiman, social construction and news.

Abstrak

Sepanjang Juli hingga Agustus 2016 lalu media massa diramaikan dengan curhat Ferry Budiman, tentang adanya setoran yang ia berikan kepada oknum petinggi di Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai dan Mabes Polri. Ramainya media massa yang memberitakan kasus ini pada saat itu tentu saja dapat membentuk citra tertentu polisi di mata masyarakat, baik citra positif maupun negatif. Media massa memiliki kemampuan itu melalui teknik framing yang dilakukannya pada berita yang dipublikasikannya tersebut. Merujuk pada pandangan Peter Berger dan Thomas Luckman tentang konstruksi realitas sosial, polemik antara kedua kubu yang bertentangan dalam kasus curhat Freddy Budiman tidak lain merupakan upaya untuk membangun konstruksi sosial melalui proses komunikasi di media massa. Proses framing itu sendiri umumnya melibatkan dua tahapan. Pertama, memilih fakta atau realitas. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu kemudian ditonjolkan atau dihilangkan dengan penggunaan perangkat tertentu, seperti penempatan di halaman atau posisi tertentu, pengulangan, pelabelan, penggunaan grafis, pemasangan foto, asosiasi, pemilihan narasumber tertentu, dan sebagainya (Eriyanto, 2002:69). Berkaitan dengan pemberitaan curhat Freddy Budiman penulis ingin melihat bagaimana KOMPAS sebagai media massa mainstream memaknai, memahami dan kemudian membingkai citra terhadap peristiwa ini.

Kata Kunci: framing, freddy budiman, konstruksi social dan berita.

A. Pendahuluan

Sepanjang Juli hingga Agustus 2016 lalu media massa diramaikan dengan curhat Ferry Budiman, seorang bandar narkoba, yang saat itu sedang menanti eksekusi mati atas

putusan pengadilan terhadap dirinya. Yang menjadi perhatian dari curahan hati Freddy Budiman saat itu adalah adanya setoran yang ia berikan kepada oknum petinggi di Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai dan Mabes Polri.

Seperti dikutip dari laman <https://www.rappler.com/indonesia/144288-ini-isi-curhatan-freddy-budiman-sebelum-dieksekusi-mati> Haris Azhar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan pada akhir Juli bahwa Freddy pernah mengaku menyuap oknum BNN dan Polri agar bisnis narkobanya langgeng. Haris kemudian menirukan kalimat Freddy dalam postingan di akun *Facebook* dengan judul '*Cerita Busuk dari Seorang Bandit*' pada tahun 2014 lalu seperti ini:

“Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang Rp 450 miliar ke BNN dan Rp 90 miliar kepada pejabat tertentu di Mabes Polri,”

Freddy Budiman adalah seorang bandar narkoba kelas kakap yang sudah divonis mati berdasarkan putusan majelis hakim Mahkamah Agung pada Rabu (20/07/2016). Mahkamah Agung menolak PK (Peninjauan Kembali) atas vonis hukuman mati majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2013. Freddy ditangkap karena terlibat penyelundupan 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Kendati sudah divonis mati tapi Freddy Budiman kembali berulah dengan menjadi otak pendirian “pabrik” ekstasi dan shabu di dalam lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nama Freddy Budiman kembali muncul polisi menggagalkan penyelundupan 50 kg shabu kristal yang disembunyikan di dalam pipa besi pada 14 Juni 2016 lalu.

Pada tanggal 28 Juli 2016 media daring *Tempo Interaktif* menulis jejak Freddy Budiman selama dalam menjalani tahanan di LP Cipinang yang sempat membuat geger masyarakat Indonesia, terutama aparat hukum. Dalam lamannya *Tempo Interaktif* menulis sebagai berikut:

“Sosok Freddy Budiman sempat menggemparkan dunia kejahatan Indonesia. Siapa mengira orang yang sempat mengendalikan bisnis narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan dikelilingi model-model cantik itu adalah seorang copet di Surabaya. Freddy pernah bikin heboh saat berpacaran dengan model majalah dewasa Anggita Sari. Media-media *infotainment* meliput kedatangan pacar-pacar cantiknya ke penjara.”

“Freddy merantau ke Jakarta untuk menggeluti bisnis barunya, narkoba. Freddy ditahan di LP Cipinang sejak 1997 lantaran terlibat kasus narkoba. Keluar-masuk penjara adalah hal biasa bagi Freddy, yang kini berusia 40 tahun. Pada 2009, Freddy kembali tertangkap karena memiliki 500 gram sabu-sabu. Saat itu dia divonis 3 tahun dan 4

bulan penjara. Lepas dari hotel prodeo, Freddy kembali tertangkap aparat pada 2011. Saat itu dia memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat Inex.”

“Pada 2012, meski di dalam penjara, Freddy membuat heboh karena kedatangan mengimpor 1,4 juta butir ekstasi. Pil haram dikirim dari Cina pada 28 April dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 8 Mei 2012. Ekstasi dibungkus dalam paket teh Cina sebanyak 12 kardus cokelat. Diduga, bila paket ini lolos, dia bisa meraup untung Rp 45 miliar.”

Bagai bola salju curhatan Freddy Budiman kepada Hariz Azhar, Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), itu kemudian menjadi polemik panas di masyarakat. Media massa baik daring maupun luring menjadikan curhat Freddy Budiman ini sebagai *headline*, dan ditulis saban hari. Salah satunya adalah koran KOMPAS yang menulis berita tentang kasus ini sebanyak lebih dari 120 berita sepanjang bulan Juli sampai September 2016. Bulan-bulan tersebut merupakan periode puncak dari kasus ini karena berdekatan dengan waktu eksekusi para terpidanan mati kasus narkoba, dalam hal ini termasuk Freddy Budiman.

Berbagai bantahan pun datang dari ketiga lembaga yang namanya disebut Freddy Budiman menerima setoran. Tidak sedikit pula kalangan yang meragukan cerita Freddy Budiman yang disampaikan melalui Haris Azhar itu. Freddy ditengarai hanya mengulur-ulur waktu eksekusi dengan memberikan pengakuan sensasional itu. Curhat Freddy Budiman kepada Haris Azhar itu sebenarnya disampaikan jauh sebelum waktu eksekusi ditentukan, yaitu pada tahun 2014. Namun Hariz Azhar baru melansirnya kepada media massa jelang eksekusi.

Praktik eksekusi hukuman mati di Indonesia, terutama dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, menjadi sorotan dunia, terutama negara-negara Eropa yang warganya masuk dalam daftar eksekusi. Berbagai organisasi nonpemerintah, termasuk KontraS, menentang praktik hukuman mati atas dasar pertimbangan melanggar HAM. Sehingga wajar kalau kemudian muncul tuduhan kalau curhatan ini hanya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi karena curhatan Freddy Budiman yang ditulis Haris Azhar itu dipublikasikan dua jam sebelum waktu eksekusi berlangsung di Nusakambangan, Jawa Tengah. Tapi Haris berdalih dia tidak buru-buru melansir temuannya itu lantaran situasi politik yang tidak kondusif menjelang pilpres dan pemilu 2014. Haris juga mengaku hubungan lembaganya dengan kepolisian maupun (presiden) Jokowi kurang harmonis.

Kasus Freddy Budiman kemudian bergulir ke ranah politik. Tidak sedikit kalangan DPR yang ingin mendalami kasus ini melalui Panja Komisi III DPR. Hal ini pernah disampaikan oleh Bambang Susatyo, Ketua Komisi III DPR RI. Pemerintah akhirnya membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mencari kebenaran kasus yang menghebohkan ini. Haris juga bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberikan informasi kepada mereka.

Curhat Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar itu menjadi menarik lantaran yang ia sebut adalah sejumlah jendral di kepolisian dan BNN. Dua institusi yang rajin melakukan operasi antinarkoba. Dari curhat Freddy Budiman itu menjadi sebuah ironi ketika aparat hukum yang memberantas narkoba justru berada di balik operasi peredaran narkoba. Kedua institusi ini kembali menjadi sorotan di tengah kinerja polisi yang belum memuaskan masyarakat. Kemudian Budi Waseso, Kepala BNN, bahkan meminta Haris untuk menunjukkan bukti setoran uang dari Freddy Budiman ke BNN.

Bantahan dari para petinggi institusi negara yang namanya disebut Freddy Budiman menerima setoran suap pun muncul dalam pemberitaan sejumlah media massa nasional, salah satunya adalah Republik Online yang menulis judul *Panglima TNI Minta Haris Azhar Perjelas Pengakuan Freddy Budiman*. Berita yang dilansir pada tanggal 31 Juli 2016 itu Republika Online menulis:

“Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan jika kesaksian aktivis Kontras, Haris Azhar tentang pengakuan Freddy Budiman dapat dibuktikan kebenarannya.”

Selain menampilkan reaksi normatif Panglima TNI pada tanggal 3 Agustus 2016 Republika Online juga melansir berita senadar dari pihak kepolisian dengan judul *Polri Minta Haris Azhar Beri Bukti Baru Pengakuan Freddy Budiman*. Dalam berita ini Republika Online menampilkan keraguan pihak polri atas curhata Freddy Budiman yang disampaikan melalui Haris Azhar;

“Sebab, kata Boy, tidak ada bukti lain seperti rekaman suara dan hanya ditulis berdasarkan ingatan Haris. "Saya tidak mau mengatakan akan mudah direkayasa. Namun menurut saya ada sesuatu yang diragukan dari yang disampaikan Freddy pada Haris," tutur dia.

Sedangkan harian KOMPAS lebih banyak menampilkan kritik terhadap institusi negara tersebut yang namanya ada dalam daftar setoran uang haram Freddy Budiman. Koran KOMPAS yang terbit pada hari Senin, 15 Agustus 2016 menulis berita dengan judul *Presiden Pelu Didesak Bentuk Tim Independen; DPR Awasi Kerja Tim Investigasi*. Kompas menampilkan statemen dari Ketua Komisi III DPR Bambang Susatyo yang

meyakini curhatan Freddy Budiman tersebut bukan isapan jempol. Artinya bahwa suap di kalangan aparat penegak hukum dengan para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan narkoba, merupakan fenomena gunung es. Yang tampak kecil dipermukaan namun sesungguhnya lebih besar dari yang terlihat. Dalam pemberitaan itu KOMPAS mengutip pernyataan Bambang sebagai berikut:

“Saya yakin yang diungkapkan Haris bukan isapan jempol. Apalagi indikasi keterlibatan oknum petinggi aparat keamanan sudah sering terdengar. Jadi DPR, juga publik, sangat berharap tim bekerja serius. Jika ada oknum yang terlibat, harus ada sanksi tegas yang dijatuhkan” jelasnya.

Pemilihan harian KOMPAS sebagai media yang diteliti penulis adalah karena reputasi KOMPAS selama ini sebagai koran yang cukup menjaga integritas pemberitaan dan merupakan koran paling berpengaruh di tanah air. Sehingga harian KOMPAS menjadi rujukan para pencari informasi. Selain itu jangkauannya yang luas, Gramedia Grup, tempat KOMPAS bernaung memiliki teknologi cetak jarak jauh yang memungkinkan koran KOMPAS dapat dibaca di seluruh pelosok penjuru negeri dalam waktu yang cepat. Alasan berikutnya adalah karena harian KOMPAS termasuk koran yang memiliki oplah tinggi di antara media massa nasional yang terbit harian.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis mengambil judul *Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman di Harian Kompa Periode Bulan Juli – September 2016* sebagai penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis memilih menggunakan analisis framing, yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. (Eriyanto, 2002:3). Menurut Eriyanto, dalam analisis framing, yang kita lakukan adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Sebaliknya, wartawan dan media yang secara aktif membentuk realitas (2002:7).

B. Tinjauan Pustaka

1. Komunikasi Massa

Massa Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Ardianto, 2007:3). Media massa merupakan elemen penting dalam pengiriman atau penyampaian pesan komunikasi. Media massa yang digunakan antara lain: media elektronik yang mencakup televisi dan radio, media cetak

yang mencakup surat kabar, majalah dan tabloid, serta media film yang menggunakan film bioskop sebagai media penyampaian komunikasi.

Definisi komunikasi massa dijelaskan secara kompleks oleh Severin dan Tankard Jr dalam bukunya *Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The Mass Media* yang telah diterjemahkan oleh Effendy. Ia mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu (Ardianto, 2007:5). Keterampilan disini maksudnya bagaimana media memfokuskan sebuah kamera televisi atau penggunaan tape recorder dalam mewawancarai narasumber. Seni dimaksudkan bagaimana media mampu melawan tantangan dalam setiap penulisan naskah dalam membuat skrip untuk televisi ataupun tata letak dalam surat kabar. Ilmu maksudnya informasi yang diberikan dapat menjadi pengembangan wawasan kepada khalayak yang membaca atau menontonnya.

Dari definisi mengenai komunikasi massa diatas, komunikasi massa memiliki karakteristik dalam setiap penyampaian pesannya, karakteristik tersebut antara lain : *Komunikator Terlembaga, Pesan Bersifat Umum, Komunikan Anonim dan Heterogen, Media Massa Menimbulkan Keserempakan, Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan, Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah, Stimulasi Alat Indra Terbatas, Umpan Balik Tertunda (Delay) dan Tidak Langsung (Indirect).*

Komunikasi massa memiliki fungsi dalam setiap penyampaian pesan melalui media massa, menurut Dominick fungsi komunikasi massa antara lain : sebagai pengawas, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai-nilai, dan hiburan (Ardianto, 2007:14). Sementara itu, Effendy mengemukakan fungsi komunikasi massa secara umum, menurutnya komunikasi massa sebagai fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi dan mempengaruhi (Ardianto, 2007:18).

2. Tentang Berita

Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang (Budyatna, 2009:40). Dari definisi tersebut dapat dibedakan antara berita yang berdasarkan objektif (fakta) dan berita berdasarkan subjektif (opini). Paul De Massenner mengatakan bahwa berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak. Sedangkan Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik sebagian besar pembaca (Sumadiria, 2008:64).

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam; kategori berita berat (straight news) dan berita ringan (soft news). Sedangkan berdasarkan sifatnya berita terbagi menjadi dua

bagian yaitu: berita terduga dan berita tak terduga. Berita terduga adalah peristiwa yang direncanakan atau sudah diketahui sebelumnya. Berita tak terduga adalah peristiwa yang sifatnya tiba-tiba, tidak direncanakan, dan tidak diketahui sebelumnya (Sumadiria, 2008:66).

Kriteria berita adalah acuan yang dapat digunakan oleh jurnalis dalam memutuskan fakta yang pantas disajikan menjadi sebuah berita (Sumadiria, 2008:80). Berikut adalah kriteria umum sebuah berita : *Keluarbiasaannya (unusualness)*, *Kebaruan (newsness)*, *Akibat (impact)*, *Aktual (timeliness)*, *Kedekatan (proximity)*, *Informasi (information)*, *Konflik (conflict)*, *Orang penting (prominence)*, *Ketertarikan manusiawi (human interest)*, *Kejutan (surprising)* dan *Seks (sex)*. (Sumadiria, 2008:80).

3. Teori Hierarki Pengaruh

Informasi atau berita yang ditampilkan oleh media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, menyusun berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Shoemaker dan Reese mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menentukan isi media, sebagai berikut:

a. Faktor individual.

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama, dan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa mempengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan media.

b. Rutinitas media,

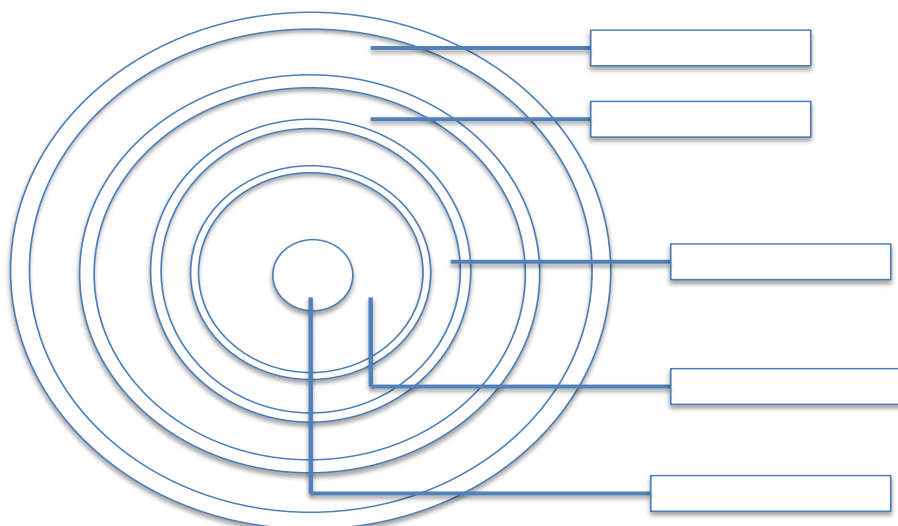
Berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pen delegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya.

c. Organisasi

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu . Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.

d. Ekstra media.

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi media ini sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media: Sumber Berita, Sumber Penghasilan Media, Pihak Eksternal, dan Ideologi.

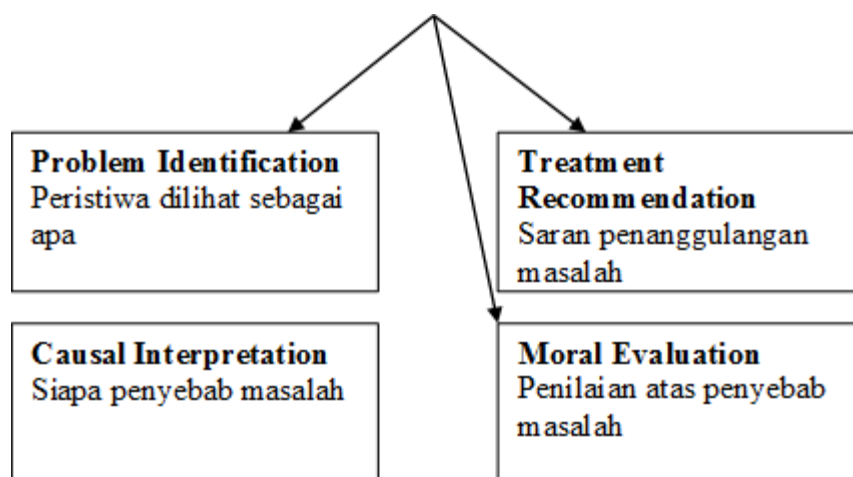


e. Teori Framing

Framing adalah metode untuk melihat cara media bercerita atas sebuah peristiwa, cara bercerita tersebut melihat terhadap realitas yang dijadikan berita (Eriyanto, 2002:10). Oleh sebab itu, analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan sebuah realitas, melihat bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana cara pembingkaiannya yang dilakukan oleh media.

Menurut Entman (Qodari, 2000 : 20) framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni Pertama, identifikasi masalah (Problem Identification), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran dan penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya (Eriyanto : 172).

Skema Framing Robert Entman



Entman mengatakan bahwa framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. (Eriyanto, 2002:221). Berdasarkan konsepsi Entman, framing pada

dasarnya merujuk kepada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Entman menggambarkan proses seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek dari realitas kedalam sebuah tabel, berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai penyeleksian isu dan penonjolan aspek realitas:

| | |
|---|---|
| <i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah) | Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa? |
| <i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? |
| <i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral) | Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? |
| <i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian) | Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? |

Sumber: Eriyanto. *Konstruksi, ideologi, dan politik media*, 2004 : 188

C. Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin memperlihatkan bagaimana harian KOMPAS melakukan framing terhadap peristiwa curhat Freddy Budiman tentang adanya setoran ke oknum di BNN, Bea Cukai dan Mabes Polri. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu (Morissan, 2009:107)

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Unit analisis data adalah pemberitaan yang terkait dengan *Framing Media Kasus Freddy Budiman (Analisi Framing Robert Entman di Harian Kompas)* di harian

Kompas selama bulan Juli – September 2016. Analisis dilakukan melalui tabel analisis data dengan menggunakan perangkat analisis framing Robert N. Entman sebagai berikut:

Tabel Analisa Data

Media Massa :
Tanggal terbit :
Judul Berita :

| Perangkat Analisis | Kutipan | Analisis |
|--|----------------|-----------------|
| <i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah) | | |
| <i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | | |
| <i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral) | | |
| <i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian) | | |

Dijelaskan Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan semua teknik pengumpulan data seperti dijelaskan di atas, melainkan hanya beberapa saja yang dibutuhkan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain:

1) Studi Pustaka

Dengan cara mempelajari buku-buku referensi, jurnal dan majalah yang menunjang objek penelitian ini.

1. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal, dalam hal ini berita yang diterbitkan oleh harian KOMPAS.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer.

Analisis data kualitasi menurut Bognan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apayang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yagn dapat diceritakan kepada orang lain.

Penulis menggunakan teknik triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data. Seperti diungkapkan Moleong (2014:33) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2014:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dari keempat macam triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber karena penulis merasa perlu untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).

D. Hasil Pembahasan

Harian KOMPAS menampilkan 6 isu selama bulan Juli – September 2016 lalu terkait pemberitaan tentang testimony Freddy Budiman yang dilansir oleh Haris Azhar. Berikut ini adalah isu-isu yang ditampilkan harian KOMPAS:

Isu Pelaksanaan Eksekusi

Dalam isu pelaksanaan eksekusi frame yang dilakukan oleh harian Kompas dalam berita berjudul *Kritik dan Masukan Menjadi Catatan* adalah munculnya inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan hukuman mati. Ada 14 terpidana yang masuk dalam daftar eksekusi, tapi pelaksanaannya hanya empat orang yang dieksekusi, termasuk Freddy Budiman.

Kompas melihat bahwa sumber masalah dari adanya inkonsistensi ini lantaran banyaknya kritik dan penolakan terhadap pelaksanaan hukuman mati. Di beberapa negara maju praktik hukuman mati sudah tidak lagi dilakukan karena dianggap melanggar Hak Azasi Manusia. Protes keras atas hukuman mati ini muncul dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, tokoh nasional hingga negara-negara sahabat, dalam hal ini adalah negara yang warga negaranya masuk dalam daftar eksekusi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi generasi muda akan bahaya narkoba yang terus mengancam. Pasaunya saat ini Indonesia sudah menjadi pasar potensial perdagangan narkoba dunia.

Harian Kompas melihat keputusan moral (*Make Moral Judgment*) dari penundaan beberapa eksekusi terpidana mati kasus narkoba adalah belum selesainya faktor yuridis dan

non-yuridis di balik proses rencana pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba menjadi alasan utama pemerintah menunda sebagian besar terpidanan mati. Pemerintah mengaku harus berhati-hati terhadap pelaksanaan hukuman mati, karena jika sampai terjadi kesalahan hal itu tidak dapat dikoreksi karena pelaksanaan eksekusi itu telah selesai dilakukan.

Kompas menekankan pada penyelesaian agar pemerintah membuka dialog untuk meminta dukungan politik dari parlemen dalam pelaksanaan proses eksekusi terpidana narkoba. Selain itu pemerintah juga diminta tegas untuk melakukan pemberantasan sindikat narkoba di tanah air yang sudah semakin mengkhawatirkan dilihat dari kuantitas barang bukti yang diungkap BNN.

Kendati berita ini tidak menjadi headline atau berita utama dalam harian Kompas di hari Sabtu, 30/07/2016 namun penempatannya di halaman satu berita yang ditulis sebagai masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan eksekusi mati tetap menjadi penting karena tetap ditempatkan di halaman satu. Ini menandakan bahwa harian Kompas melihat sejumlah catatan yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan eksekusi mati terhadap para terpidana narkoba.

Isu Suap Oknum Polisi, BNN dan TNI

Frame yang dilakukan oleh koran Kompas mengenai Freddy Budiman terkait dengan isu Suap Oknum Polisi, BNN dan TNI dilakukn pada dua berita berjudul *DPR Awasi Kerja Tim Investigasi* dan *Ada Rekaman Freddy Sebelum Dieksekusi*, adalah sebagai berikut;

Pada judul berita pertama harian Kompas menempatkan pendefinisian Masalah (*Define Problems*) pada rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga anti narkoba (BNN) dan institusi lainnya seperti Polri, TNI dan Ditjen Pemasarakan Kementerian Hukum dan HAM. Isu suap yang dihembuskan Freddy Budiman melalui Haris Azhar, mantan koordinator Kontras, menjadi titik balik pembuktian aparaturnegara dalam hal ini lembaga terkait dalam pemberantasan narkoba dan sindikat narkoba internasional.

Sedangkan pada judul kedua *Ada Rekaman Sebelum Freddy Dieksekusi* harian Kompas menempatkan pendefinisian masalah (*Define Problems*) pada adanya kecurigaan Haris Azhar, mantan koordinator Kontras atas ketidakterbukaan aparat penegak hukum terhadap rekaman testimony yang dibuat Freddy Budiman sebelum eksekusi. Haris meyakini kalau dalam rekaman itu terdapat nama-nama aparat penegak hokum yang disebut Freddy Budiman menerima suap dari uang haram penjualan narkoba.

Pihak Ditjen Pemasarakan Kementerian Hukum dan Ham membantah kalau rekaman yang dilakukan pihaknya sebelum Freddy Budiman dieksekusi mati adalah

rekaman yang dimaksud Haris Azhar. Rekaman itu hanya berisi pengakuan Freddy Budiman yang telah bertobat dan menghatamkan Al Quran selama menjalani hukuman penjara

Harian Kompas melihat letak dari sumber masalah (*Diagnose Cause*) pada berita peratama adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan narkoba dinilai tidak bersih alias terlibat dalam sindikat narkoba itu sendiri. Stigma aparat kotor itu sudah lama bercokol dalam benak masyarakat luas. Apalagi kemudian dalam kasus Freddy Budiman misalnya, terbukti ada aparat TNI yang terlibat dalam pengiriman impor jutaan ekstasi dari Tiongkok.

Isu aparat kotor alias terlibat dalam jaringan sindikat narkoba internasional menemukan buktinya ketika ada anggota Badan intelejen Strategis TNI, sersan Mayor Supriadi, dihukum karena membantu Freddy Budiman mengimpor 1,4 juta butir ekstrasi dari Tiongkok. Sedangkan pada berita kedua sumber masalahnya adalah pihak Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Ham tak mau membeberkan atau membuka kepada publik apa isi rekaman Freddy Budiman tersebut sebelum dieksekusi.

Keputusan Moral (*Make Moral Judgment*) yang ditampilkan harian Kompas dalam berita pertama yaitu pembentukan tim investigasi yang terdiri dari aparat dari instansi-instansi yang terlibat dalam pemberantasan narkoba, seperti BNN, Polisi, Ditjen Pemasarakatan Kemenkum HAM, dan TNI. Pembentukan tim investigasi pengakuan Freddy Budiman yang telah menyuap oknum aparat pemberantasna narkoba menjadi bukti serius pemerintah membersihkan lembaga-lembaga hokum tersebut dari pengaruh sindikat narkoba. Keterlibatan DPR sebagai wakil rakyat dalam mengawasi kinerja tim agar public tahu sejauh mana proses penyelidikan oleh tim tersebut.

Sedangkan keputusan moral pada berita kedua adalahtim Internal Badan Narkotika Nasional melakukan pemeriksaan sejumlah petugas Lembaga Pemasarakat Nusakambangan, Cilacap, dan dokumen yang terkait Freddy Budiman pada tahun 2014. Tim BNN melakukan verifikasi adanya dugaan orang yang mengaku petugas BNN mencabut kamera pengintai di sel Freddy Budiman. Dan memverifikasi keterangan mantan kepada LP Nusakambangan, Liberty Simanjuntak.

Dan Penekanan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*) yang direkomendasikan harian Kompas pada berita pertama adalah meminta klarifikasi Haris Azhar, sebagai orang yang menjadi “juru bicara” Freddy Budiman untuk membuka siapa saja identitas aparat penegak hokum yang menerima suap tersebut. Membuka file rekaman CCTV untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang menemui Freddy Budiman selama di

lembaga pemasyarakatan. Adakah aparat penegak hukum yang datang menemui Freddy Budiman di penjara. Meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan senilai Rp 3,6 triliun di tahun 2012, yang diduga terkait sindikat perdagangan narkoba jaringan Freddy Budiman.

Sedangkan pada berita kedua penekanan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*): Meminta PPATK membuka temuannya atas transaksi senilai Rp 3,6 triliun yang diduga terkait sindikat narkoba yang dikendalikan Freddy Budiman. Pengungkapan itu niscaya akan membuat terang siapa saja aparat penegak hukum yang menerima suap Freddy Budiman.

Harian Kompas menempatkan kedua berita itu bukan pada halaman utama seperti pada isu Eksekusi Mati. Kompas melihat urgensi kasus ini pada penerbitan di hari Minggu, 14/08/2016 dan Senin 15/08/2016 tidaklah sebesar berita lainnya yang ditempatkan di halaman utama namun Kompas masih melihat kasus ini sebagai kasus yang menarik perhatian masyarakat. Masyarakat menunggu hasil akhir dari cerita yang diungkap oleh Haris Azhar.

Isu Pencemaran Nama Baik

Pada isu Pencemaran Nama Baik harian Kompas menuliskan tiga berita berjudul antara lain *Freddy Tinggalkan Sejuta Tanya, Hasil Kerja Tim Ditunggu dan Polri Tunda Pengusutan Kasus Haris*. Harian Kompas kemudian melakukan framing ke dalam ketiga berita itu sebagai berikut:

Kompas menempatkan pendefinisian Masalah (*Define Problems*) pada berita pertama pada testimoni Freddy Budiman yang disampaikan melalui Haris Azhar tidak dapat ditelusuri lebih dalam karena Freddy Budiman sebagai orang pertama (pemberi testimoni) sudah dieksekusi sehingga kasus ini menjadi semakin sulit diungkap kebenarannya.

Sedangkan pada berita kedua pendefinisian Masalah (*Define Problems*) diletakkan pada adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, terkait terstimoni Freddy Budiman yang dia publish menggunakan media social. Dalam tulisan Haris Azhar, Freddy mengaku telah melakukan suap kepada oknum dari institusi Polri, BNN dan TNI.

Dan pada berita ketiga Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) terjadi pada polisi yang focus dan lebih memprioritaskan investigasi terkait dugaan keterlibatan oknum Polri dalam penanganan kasus narkoba dengan terpidana mati Freddy Budiman. Investigasi

ini dilakukan setelah adanya testimony Freddy Budiman yang diungkapkan Haris Azhar melalui media social.

Sumber Masalah (*Diagnose Cause*) pada kasus testimony Freddy Budiman diberita pertama ini diletakan pada Haris Azhar, sebagai orang penerima testimony dari Freddy Budiman, mengungkap testimony itu justru hanya beberapa jam sebelum eksekusi Freddy Budiman dilakukan sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan tertentu kepada mantan Koordinator Kontras tersebut. Haris Azhar kemudian dilaporkan oleh institusi-institusi yang oknumnya disebut menerima uang dari Freddy Budiman.

Pada berita yang kedua Kompas melihat sumber Masalah (*Diagnose Cause*) kasus ini juga pada Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, dituduh melakukan pencemaran nama baik dengan mengunggah testimony Freddy Budiman karena tanpa menyertakan bukti-bukti otentik mengenai tuduhan Freddy Budiman terhadap oknum dari institusi seperti BNN, Polri, dan TNI. Sedangkan pada berita ketiga Kompas meletakan Sumber Masalah (*Diagnose Cause*): kepada TNI, Polri dan BNN melaporkan Haris Azhar dengan dugaan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap ketiga institusi negara tersebut.

Untuk keputusan moral (*Make Moral Judgment*) pada berita pertama Kompas melihatnya sebagai upaya Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membentuk tim internal TNI untuk menggali keterangan dari oknum TNI yang terlibat dalam jaringan narkoba Freddy Budiman. Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Ham mencari informasi tentang pencopotan CCTV dari sel Freddy Budiman pada saat ada oknum BNN mendatanginya.

Pembentukan tim independen ini juga menjadi keputusan moral yang ditulis Kompas untuk berita kedua yaitu pembentukan tim independen sebagai respon atas pengakuan Haris Azhar tentang testimony yang diberikan Freddy Budiman kepada dirinya. Tim ini terdiri dari berbagai individu dari berbagai institusi seperti Polri yang dipimpin Komjend Dwi Priyatno, Hendaradi Dari Setara Institute, Poengky Indarti dari Kompolnas dan Effendi Ghazali, Pakar Komunikasi Universitas Indonesia.

Sedangkan pada berita ketiga Kompas melihat keputusan moralnya pada ditundanya penyelidikan terhadap dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, yang mempublikasikan pengakuan Freddy Budiman terkait suap yang dilakukannya kepada oknum di institusi Polri, TNI dan BNN.

Pada isu pencemaran nama baik di berita pertama ini Kompas memberikan penekanan penyelesaian (*Treatment Recommendation*):pada keharusan adany investigasi

mendalam terhadap institusi-institusi yang oknumnya disebut menerima suap Freddy Budiman sebagai bentuk konfirmasi atas kebenaran testimony tersebut.

Sedangkan pada berita kedua penekanan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*): dilihat pada Hasil dan rekomendasi dari Tim Independen ini digunakan sebagai masukan bagi Badan Reserse Kriminal Polri dalam menindaklanjuti laporan Polri, TNI dan BNN terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar.

Sementara pada berita ketiga Kompas memberikan Penekanan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*) pada keharusan adanya koordinasi antarinstansi yang membentuk tim investigasi di lingkungan institusinya masing-masing. Koordinasi ini untuk membagikan temuan atau informasinya terkait hal ini. Presiden Joko Widodo juga diharapkan melakukan tindakan nyata kampanye melawan narkoba yang telah menjerumuskan bangsa ke dalam kekelaman.

Isu pencemaran nama baik menjadi penting bagi Kompas hal ini terlihat dari penempatan kedua berita dalam hal ini pada judul berita tanggal 10 dan 11 Agustus 2016 yang diletakan pada halaman satu. Sedangkan pada berita tanggal 7 Agustus 2016, Kompas meletakan judul berita Freddy Tinggalkan Sejuta Tanya pada halaman dua.

Isu Sindikat Narkoba

Pada isu sindikat narkoba harian Kompas menulis judul *Bisnis Proteksi Kriminal*. Ini merupakan opini public yang ditulis Usman Hamid. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*): Adanya bisnis beking oleh aparat sipil dan militer kepada praktik kriminalitas, dalam hal ini adalah sindikat narkoba dalam kasus jaringan Freddy Budiman.

Sedangkan sumber masalah (*Diagnose Cause*) bisa dilihat pada adanya para oknum aparat baik sipil maupun militer (Polri dan TNI) menjadi backing dalam jaringan kriminalitas, dalam hal ini adalah sindikat narkoba.

Keputusan Moral (*Make Moral Judgment*) yang ditulis Kompas adalah pembentukan tim investigasi independen di bawah Presiden Joko Widodo secara langsung mengingat adanya dugaan keterlibatan para pejabat negara, baik Polri maupun TNI.

Dan Kompas menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) pada adanya partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa dalam mengawal kasus ini agar tuntas dan transparan dalam melihat siapa saja yang terlibat dalam jaringan narkoba trans-nasional ini. Isu agaknya ini tidak menarik perhatian Kompas sehingga tidak ditindak lanjuti dengan penulis berita selanjutnya dengan isu yang sama.

Isu Humanisme

Isu HAM dijadikan alat kampanye untuk menekan pemerintah agar membatalkan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Pada isu ini harian KOMPAS menampilkan dua berita berjudul *Tembak Mati Tidak Manusiawi* dan *Pemerintah Didesak Lakukan Moratorium Eksekusi*. KOMPAS menampilkan sumber-sumber informasi dari kalangan pemerintah yang menolak melakukan pembatalan atau penundaan pelaksanaan hukuman mati. KOMPAS mengutip keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Freddy Budiman agar eksekusinya tidak jadi dilaksanakan.

Aliran Uang Freddy

Pada isu ini KOMPAS menampilkan keterangan dari pihak PPATK yang menelusuri aliran uang haram bisnis narkoba jaringan Freddy Budiman. Ternyata diketahui kalau jaringan Freddy Budiman memiliki pengaruh yang luas, terlebih dengan muncul isu suap dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis haram ini. KOMPAS menampilkan wawancara dari pihak BNN dan PPATK yang mencurigai adanya transaksi 3,6 triliun rupiah yang diduga berasal dari bisnis haram tersebut. Isu ini diangkat untuk mengetahui kemana saja aliran uang haram itu mengalir, benarkah ada di antaranya masuk ke dalam rekening pejabat institusi yang diduga menerima suap Freddy Budiman.

Penonjolan Aspek Tertentu

Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks ditampilkan dan bagian mana saja yang mendapat –perhatian lebih atau ditonjolkan, dianggap penting oleh wartawan atau redaktur. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat khalayak. Informasi yang menonjol lebih diterima oleh khalayak.

Menurut penjelasan Robert Entman, meskipun analisis framing dipakai dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkannya adalah bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak. Konsep framing Entnam digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto,2002:186).

Merujuk pada keterangan Robert Entman di atas penulis melihat selama kurun waktu tersebut harian KOMPAS memberikan perhatian atau penonjolan terhadap isu kemanusiaan atau HAM di balik ramainya kontroversi pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dan soal isu suap atau keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba

Freddy Budiman. Dua hal ini sangat menonjol mengingat di tengah gencarnya Indonesia melakuakn perang terhadap narkoba, justru muncul isu keterlibatan aparat penegak hokum dalam jaringan bisnis narkoba, dan melibatkan jumlah uang yang sangat besar hingga puluhan miliar rupiah. Uang-uang ini diduga mengalir ke rekening oknum-oknum pejabat tersebut.

Yang kedua adalah isu HAM lantaran di saat banyak negara sudah mulai meninggalkan atau tidak lagi menjadikan hukuman mati sebagai vonis bagi para criminal, Indonesia justru gencar melakukan eksekusi hukuman mati. Setidaknya dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja sudah dua kali eksekusi hukuman mati dilaksanakan. Hal ini mengundang protes dan reaksi keras dari negara-negara sahabat dan para pegiat HAM.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian melalui pemberitaan-pemberitaan pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan oleh Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, tentang adanya suap kepada oknum aparat TNI, Polri dan BNN dalam sindikat narkoba Freddy Budiman yang terbit di harian Kompas dengan empat seleksi isu dengan 7 berita dapat disimpulkan bahwa frame yang dibangun oleh harian Kompas adalah sebagai berikut:

- a. Testimoni Freddy Budiman seperti yang disampaikan oleh Haris Azhar adalah fenomena gunung es yang melibatkan transaksi kepentingan antara para pelaku kejahatan atau criminal dengan aparat berwenang, dalam hal ini adalah aparat keamanan dan penegak hukum. Hal ini semakin terlihat dengan adanya sikap defensif dari ketiga institusi yang anggotanya disebut dalam jaringan sindikat narkoba Freddy Budiman dengan melaporkan Haris Azhar dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada ketiga institusi tersebut.
- b. Langkah pemebentukan tim independen yang melibat institusi non-pemerintah dan tokoh atau aktivis anti narkoba menjadi langkah yang disarankan banyak pihak. Hal ini mengingat tim investigasi yang dibentuk ketiga lembaga tersebut dkuatirkan tidak akan netral alias adanya bias kepentingan sehingga disarankan pula untuk menempatkan tim independen ini di bawah kendali Presiden Joko Widodo langsung mengingat adanya dugaan keterlibatan aparat negara.

- c. Harian Kompas mendeskripsikan bagaimana ketiga institusi tersebut; TNI, Polri dan BNN, termasuk Ditjen Pemasarakan Kementerian Hukum dan HAM justru sibuk sendiri untuk menginvestigasi testimony Freddy Budiman untuk kepentingan membersihkan nama institusinya masing-masing.
- d. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa harian Kompas memberikan keberpihakannya kepada Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, yang justru dilaporkan ketiga institusi negara yang anggotanya disinyalir menerima uang suap dari Freddy Budiman. Hal itu terlihat dari konstruksi berita yang ditampilkan Kompas dalam pemberitaan selama periode tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah diuraikan penulis, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Peneliti berharap agar peneliti berikutnya yang menggunakan teori framing Entman untuk dapat mengembangkannya dengan menambahkan teori lainnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam lagi.
- b. Dengan semakin banyaknya penelitian konten media massa, terutama framing, peneliti berharap agar khalayak dapat mengerti dan memahami sebuah berita sebagai konstruksi realita media sehingga tidak mudah terjebak dalam pemaknaan yang dibuat media dengan tujuan-tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar (2011), *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Anwar (2014). *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baran, Stanley J. (2008). *Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media & Budaya, Jilid 1 Edisi 5*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan (Ed). (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Eriyanto (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Ishwara, Helen. (2001) *P.K. Ojong: Hidup sederhana, Berpikir Mulia*, Jakarta: Kompas.
- Jamdan, Mohamad Yusuf. (trans). Littlejoh, Stephen W, Karen A. Foss, *Teori*
- Kovach & Rosentiel, Bill & Tom (2001). *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Pantau.
- Mulyana, Deddy. (2014). *Komunikasi Politik – Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J (2014). *Metodologi Penelitian Kualitaitaif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Kaid, Lynda Lee, (2015) *Handbook Penelitian Komunikasi Politik*. Jakarta: Nusamedia.
Santana K, Septiawan (2005) *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: YOI.
Sobur, Alex, Drs. (2012). *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sularto, St. (2007). *KOMPAS: Menulis dari Dalam*. Jakarta: Gramedia.
Suyitno I, Wahyuni L. Suwarna. Jorgensen, Marianne W. & Louise J. Phillips (2010). *Analisis Wacana: Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

- Dhakidae, Danile (1991) Disertasi berjudul "The state, the rise of capital"
Shoemaker dan Reese, (1996) [Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media](#)
Journal Social Movement Studies Volume 10, 2011 - Issue 1
American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 1; January 2012
The International Journal of Press/Politics 2008:13:52
Journal of Journalism Studies Commons
The International Journal of Journalism and Mass Communication, Vol 5
Jurnal Komunikasi Malaysian jilid 31
Athens Journal of Mass edia and Communications Vol. X, No. Y.
International Journal of Communication9 (2015).
Journal of Communication Volume 52, Issue 1 January 2002
Journal International Feminist Journal of Politics Volume 12, 2010 - Issue 1